

SURAT MASUK TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.004/9/OTL/2025 Jakarta, 10 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Permohonan Usulan Person In Charge (PIC)
Modul Usulan Pensiun dan E-SOP

Yth. Periksa Daftar Terlampir.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bersama ini disampaikan bahwa Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah membangun Modul Usulan Pensiun dan *Electronic Standar Operating Procedure* (E-SOP) yang menjadi bagian dari pengembangan layanan informasi pada *Indonesia Civil Aviation Portal* (ICAP).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan dan pemutakhiran data pada kedua modul tersebut, dengan hormat kami mohon kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menunjuk dan menyampaikan nama *Person In Charge* (PIC) yang akan bertanggung jawab pada masing-masing modul dimaksud. Usulan nama PIC tersebut harap disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana **paling lambat tanggal 12 September 2025** dengan format terlampir. PIC Modul Usulan Pensiun dan E-SOP tidak harus berasal dari orang yang sama, sehingga unit kerja dapat mengusulkan PIC yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Boy Aghnia Rifadhan (0821 1397).8881

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : KP.004/9/OTL/2025

Tanggal : 10 September 2025

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I - X;
3. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : KP.004/9/OTL/2025

Tanggal : 10 September 2025

**USULAN NAMA PERSON IN CHARGE (PIC)
PENGELOLAAN MODUL USULAN PENSIUN DAN E-SOP**

No.	Nama	NIP	No HP	E-Mail	Keterangan
1					PIC Usulan Pensiun
2					PIC E-SOP
dst.					

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 350550 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505136 - 3505139
3507144 - 34833369

Nomor : UM.207/67/DJPU.REN/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rekonsiliasi

Jakarta, 9 Desember 2025

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka masing masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara diwajibkan menyusun dokumen perencanaan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dimohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Selasa - Sabtu, 16 – 20 Desember 2025
Waktu : Jadwal terlampir
Tempat : Crowne Plaza Bandung by IHG
Jl. Lembong No.19, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111
Acara : 1. Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RA) Tahun 2025/2026 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
2. Rencana Aksi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan dalam mendukung Pencapaian Kinerja Sesditjen Perhubungan Udara
Jadwal : Terlampir
Pakaian : Batik

Terkait butir 1 (satu) di atas, biaya selama penyelenggaraan rapat ditanggung masing-masing unit kerja. Mengingat pentingnya hasil kegiatan, mohon dapat menugaskan pegawai yang berkompeten serta hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.207/67/DJPU.REN/2025
Tanggal : 9 Desember 2025

Kepada Yth :

Narasumber

1. **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peserta

1. Direktur Angkutan Udara
2. Direktur Bandar Udara
3. Direktur Keamanan Penerbangan
4. Direktur Kelaikudaran dan Pengoperasian Pesawat Udara
5. Direktur Navigasi Penerbangan
6. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
7. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan
8. Kepala Balai Teknik Penerbangan
9. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KP.004/9/OTL/2025 Jakarta, 10 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Permohonan Usulan Person In Charge (PIC)
Modul Usulan Pensiun dan E-SOP

Yth. Periksa Daftar Terlampir.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bersama ini disampaikan bahwa Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah membangun Modul Usulan Pensiun dan *Electronic Standar Operating Procedure* (E-SOP) yang menjadi bagian dari pengembangan layanan informasi pada *Indonesia Civil Aviation Portal* (ICAP).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan dan pemutakhiran data pada kedua modul tersebut, dengan hormat kami mohon kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menunjuk dan menyampaikan nama *Person In Charge* (PIC) yang akan bertanggung jawab pada masing-masing modul dimaksud. Usulan nama PIC tersebut harap disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana **paling lambat tanggal 12 September 2025** dengan format terlampir. PIC Modul Usulan Pensiun dan E-SOP tidak harus berasal dari orang yang sama, sehingga unit kerja dapat mengusulkan PIC yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Boy Aghnia Rifadhan (0821 1397).8881

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : KP.004/9/OTL/2025

Tanggal : 10 September 2025

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I - X;
3. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : KP.004/9/OTL/2025

Tanggal : 10 September 2025

**USULAN NAMA PERSON IN CHARGE (PIC)
PENGELOLAAN MODUL USULAN PENSIUN DAN E-SOP**

No.	Nama	NIP	No HP	E-Mail	Keterangan
1					PIC Usulan Pensiun
2					PIC E-SOP
dst.					

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

SURAT KELUAR TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
CAKRABHUWANA CIREBON

Jln. Jend . Sudirman No. 01
Cirebon - 45144

Telephon : (0231) 484 085
E – Mail : cakrabhuwana_airport@yahoo.co.id

Fax : (0231) 484 085

Nomor : AU.201/1/8/BUC/2025
Klasifikas : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perbaikan Dokumen ASP Hasil Presentasi

Cirebon , 27 November 2025

Yth. Direktur Keamanan Penerbangan

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU.201/32/21/DJPU.DKP-2025 tanggal 19 November 2025 Perihal Evaluasi Hasil Pelaksanaan Presentasi Program Keamanan Bandar Udara Cakrabhuwana, dengan hormat bersama ini disampaikan bahwa Kantor UPBU Cakrabhuwana Cirebon telah melakukan beberapa perbaikan terhadap amandemen Dokumen ASP mendasari hasil presentasi guna mohon menjadi evaluasi dan arahan lebih lanjut (dokumen terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Pintanugra Persadanta

NIP. 19850707 201012 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
CAKRABHUWANA CIREBON

Jln. Jend Sudirman No. 01
Cirebon 45144

Telepon : (0231) 484085 - 484540
E-mail : cakrabhuwana_airport@yahoo.co.id

Fax : (0231) 484085

Nomor : PL.402/1/25/BUC/2025
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Klarifikasi

Cirebon, 30 Desember 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon Nomor : S-137/MK/KNL.0806/2025 Tahun 2025 Tanggal 22 Desember 2025 Perihal Klarifikasi Barang Milik Negara Dengan Hasil Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Sebesar 0% (nol) Persen, dengan hormat bersama ini disampaikan bahwa untuk 3 (Tiga) jenis barang sesuai NUP pada lampiran surat ini telah dilakukan alih status menjadi Gedung Kantor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP - STJ 458 Tahun 2024 tentang Penetapan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II Menjadi Bangunan Kantor Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Cakrabhuwana Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Priyongra Permana
NIP. 198107012010121002

Tembusan ;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3. Kepala Kantor UPBU Kelas I Budiarto



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP - STJ 458 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN II

MENJADI BANGUNAN KANTOR

PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III

CAKRABHUWANA CIREBON

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Pengguna Barang perlu melakukan Penetapan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II Menjadi Bangunan Kantor;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan alih fungsi rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II menjadi bangunan kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II Menjadi Bangunan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Cakrabhuwana Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang atau Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PL.301/5/25/SDJ.Bagkeu-2024 hal Permohonan Alih Fungsi Aset BMN Berupa Rumah Negara Menjadi Bangunan Gedung Kantor pada UPBU Cakrabhuwana Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN II MENJADI BANGUNAN KANTOR PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III CAKRABHUWANA CIREBON DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

PERTAMA : Menetapkan alih fungsi rumah negara golongan II sejumlah 3 (tiga) unit menjadi Bangunan Kantor pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Cakrabhuwana Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, total nilai perolehan sebesar Rp302.956.667,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas alih fungsi rumah negara golongan II menjadi bangunan kantor; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN
DAN PENGELOLAAN BMN,

Ttd.

GIGIH RETNOWATI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat;
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP - STJ 458 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLOONGAN II
MENJADI BANGUNAN KANTOR PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III CAKRABHUWANA CIREBON
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DAFTAR RUMAH NEGARA GOLOONGAN II
YANG AKAN DIALIHFUNGSIKAN MENJADI BANGUNAN KANTOR
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III CAKRABHUWANA CIREBON
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

No.	Semula					Menjadi				
	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas		Nilai Perolehan (Rp)	Kode Barang	Jenis Barang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Jumlah	Satuan	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4010202001	14	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2007	1	Unit	152.320.667	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	Digunakan Sebagai Tempat Peralatan Unit Bangland dan Tempat PPNPN
2.	4010202001	17	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2013	1	Unit	75.318.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	Lokasi Sebelah Gedung ATC Tower
3.	4010202001	18	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2013	1	Unit	75.318.000	4010101999	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	Digunakan Sebagai Kantor Unit Bangunan dan Landasan
Jumlah					3		302.956.667			

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,
PERHUBUNGAN
F. BUDI PRAYITNO

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN
DAN PENGELOLAAN BMN,

Ttd.

GIGIH RETNOWATI